



---

## Peranan Budaya Hukum Dalam Kasus Pembunuhan Vina di Cirebon

Cecilia Febrina<sup>1</sup>, Faizah Anindita<sup>2</sup>, Kasman Ely<sup>3</sup>, Elsi Kartika Sari<sup>4</sup>

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [ceciliafebrina889@gmail.com](mailto:ceciliafebrina889@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [faizahanindita9@gmail.com](mailto:faizahanindita9@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[kasmanely922@gmail.com](mailto:kasmanely922@gmail.com)<sup>3</sup>, [elsi.ks@trisakti.ac.id](mailto:elsi.ks@trisakti.ac.id)<sup>4</sup>

---

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025  
Article Accepted: 05 Juni 2025, Article published: 16 Juni 2025

---

### ABSTRACT

The murder case of Vina in Cirebon has triggered a renewed public discourse on the significance of legal culture in shaping the law enforcement process in Indonesia. This tragic event gained widespread attention due to numerous legal irregularities and sparked active civic participation demanding substantive justice. This study aims to analyze the role of legal culture in the public response to the case and to identify the key factors contributing to the delay in its resolution. Using a normative approach and library research method, the study examines how the interaction between societal legal culture, law enforcement institutions, and social dynamics impacts the legitimacy of the judicial system. The findings indicate a shift in public legal culture from passive to participatory, exerting moral pressure on legal authorities. However, this also presents a dilemma when public opinion prevails over factual legal processes. Moreover, structural weaknesses in early investigation, rigid legal bureaucracy, low legal literacy, political interference, and media pressure have further eroded public trust. The study recommends fostering a rational, critical, and participatory legal culture to ensure substantive justice and a more trustworthy legal system in the future.

**Keywords:** Legal Culture, Vina Case, Law Enforcement, Substantive Justice

### ABSTRAK

Kasus pembunuhan Vina di Cirebon membuka wacana baru mengenai pentingnya budaya hukum dalam memengaruhi jalannya proses penegakan hukum di Indonesia. Tragedi ini menarik perhatian publik karena dianggap menyimpan banyak kejanggalan dalam proses hukum, serta memunculkan partisipasi aktif masyarakat dalam menuntut keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran budaya hukum masyarakat dalam merespons kasus tersebut dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan lambatnya penyelesaian perkara. Menggunakan pendekatan normatif dan metode studi pustaka, penelitian ini mengkaji bagaimana interaksi antara budaya hukum masyarakat, kelembagaan penegak hukum, dan dinamika sosial memengaruhi legitimasi sistem peradilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan budaya hukum masyarakat dari pasif menjadi partisipatif mampu menjadi tekanan moral terhadap aparat hukum, namun sekaligus menimbulkan dilema ketika opini publik mendominasi sebelum proses pembuktian tuntas. Di sisi lain, kelemahan struktural dalam penyidikan awal, birokrasi hukum yang kaku, rendahnya literasi hukum, serta intervensi politik dan tekanan media sosial memperburuk kepercayaan publik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan

*budaya hukum yang rasional, kritis, dan partisipatif guna mewujudkan keadilan yang substantif dan sistem hukum yang berintegritas di masa mendatang.*

**Kata Kunci:** *Budaya Hukum, Kasus Vina, Penegakan Hukum, Keadilan Substantif*

## PENDAHULUAN

Kasus pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 kembali mencuat ke ruang publik setelah munculnya berbagai sorotan media dan dokumenter yang mengangkat kejanggalan dalam proses hukumnya. Peristiwa tragis ini tidak hanya menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga mengusik rasa keadilan masyarakat luas. Banyak pihak mempertanyakan integritas penyidikan, transparansi proses hukum, serta kemungkinan adanya pelaku lain yang belum terungkap. Dalam konteks ini, sorotan terhadap kasus Vina bukan hanya menysasar aspek kriminal semata, melainkan juga menyoroti problematika budaya hukum dan efektivitas sistem peradilan di Indonesia.

Budaya hukum merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum yang mempengaruhi bagaimana masyarakat memahami, merespons, dan mempercayai hukum sebagai alat pencipta keadilan. Dalam teori Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Budaya hukum dalam konteks ini mencerminkan sikap kolektif masyarakat terhadap hukum, termasuk bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam proses penegakan hukum. Perubahan dari budaya hukum yang pasif menjadi lebih aktif dan kritis tercermin nyata dalam respons publik terhadap kasus Vina.

Partisipasi masyarakat dalam menuntut keadilan atas kasus Vina menunjukkan gejala pergeseran budaya hukum yang signifikan. Masyarakat tidak lagi diam atau apatis terhadap proses hukum, melainkan aktif menggunakan media sosial dan saluran digital lainnya untuk menyuarakan aspirasi serta menekan aparat agar bekerja secara akuntabel. Fenomena ini mencerminkan semangat kolektif untuk menegakkan keadilan substantif, sekaligus mengindikasikan bahwa budaya hukum masyarakat sedang berkembang ke arah yang lebih sadar dan partisipatif. Namun, partisipasi ini juga mengandung potensi dilematis ketika tekanan publik berlangsung tanpa dasar fakta yang memadai.

Di sisi lain, respons lembaga penegak hukum terhadap tekanan publik dalam kasus ini menunjukkan adanya problem dalam budaya hukum institusional. Rendahnya profesionalisme aparat, kurangnya koordinasi antarlembaga, serta birokrasi yang tertutup mencerminkan lemahnya budaya hukum di internal institusi. Budaya birokratis yang defensif terhadap kritik sering kali justru memperburuk krisis kepercayaan publik. Ketika penanganan kasus lebih berorientasi pada penyelesaian administratif ketimbang pembuktian kebenaran secara komprehensif, maka keadilan yang dihasilkan hanya bersifat formal dan belum tentu dapat diterima secara sosial.

Selain kelemahan institusional, rendahnya literasi hukum masyarakat juga menjadi faktor penting yang memengaruhi dinamika budaya hukum. Banyak warga tidak memahami secara utuh proses hukum yang berlaku, sehingga mudah

dipengaruhi oleh narasi yang belum terverifikasi. Hal ini memperbesar risiko terbentuknya opini publik yang bias dan mendorong penghakiman massa di luar koridor hukum. Budaya hukum yang ideal seharusnya ditopang oleh pemahaman kritis masyarakat terhadap hukum, termasuk kesadaran akan asas praduga tak bersalah dan pentingnya proses pembuktian yang sah.

Fenomena dalam kasus Vina juga menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosiologis. Secara normatif, proses hukum telah berjalan dengan putusan pengadilan. Namun secara sosiologis, masyarakat belum merasa keadilan telah ditegakkan secara tuntas. Kesenjangan ini menjadi tantangan dalam pembangunan budaya hukum yang berkeadilan, karena hukum yang tidak memiliki legitimasi sosial akan sulit menjalankan fungsinya sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang sah dan damai. Dalam hal ini, budaya hukum yang progresif berperan sebagai jembatan antara hukum yang tertulis dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran budaya hukum dalam memengaruhi proses penegakan hukum pada kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi dinamika interaksi antara budaya hukum masyarakat, budaya hukum institusional, serta faktor-faktor sosial yang berkontribusi terhadap lambatnya penyelesaian kasus. Dengan pendekatan normatif dan studi pustaka, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi penguatan budaya hukum yang berkeadilan, rasional, dan partisipatif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode studi pustaka untuk mengkaji fenomena hukum yang berkaitan dengan peran budaya hukum dalam proses penegakan hukum pada kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku serta menelaah teori-teori hukum melalui literatur sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, dan dokumen hukum yang relevan. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya memahami bagaimana dinamika sosial, persepsi masyarakat, dan budaya hukum institusional berinteraksi dalam membentuk respons terhadap kasus hukum yang mendapat sorotan publik. Fokus utama terletak pada identifikasi kontribusi budaya hukum dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap sistem peradilan, serta bagaimana kelemahan struktural dan sosiokultural memengaruhi keterlambatan penyelesaian kasus secara menyeluruh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Budaya Hukum Masyarakat Dalam Merespons Proses Penegakan Hukum Pada Kasus Pembunuhan Vina di Cirebon

Budaya hukum masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam sistem hukum yang turut menentukan efektivitas dan legitimasi proses penegakan

---

hukum. Dalam konteks Indonesia, budaya hukum sering kali dipahami sebagai sikap, pandangan, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum, termasuk sejauh mana masyarakat memahami, mempercayai, dan menghormati hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan. Dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon, peran budaya hukum masyarakat menjadi sangat mencolok dan menonjol, khususnya dalam bentuk partisipasi aktif, kritik publik, serta tekanan sosial terhadap aparat penegak hukum untuk mengungkap kebenaran secara transparan dan adil.

Kasus Vina yang kembali menjadi perhatian luas masyarakat pada tahun 2023–2024 sebenarnya telah disidangkan dan diputuskan sejak 2016. Namun, munculnya berbagai informasi baru, termasuk narasi dari media sosial, dokumenter film, dan kesaksian publik, menimbulkan keresahan dan keraguan akan keabsahan serta integritas proses hukum yang telah berlangsung. Dalam hal ini, budaya hukum masyarakat tercermin dari reaksi publik yang tidak hanya pasif menerima hasil putusan pengadilan, melainkan secara aktif mempertanyakan, menelaah, bahkan menuntut dibukanya kembali penyidikan kasus tersebut (Glendikho, A. 2024). Partisipasi masyarakat dalam menuntut keadilan bagi korban pembunuhan ini menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat Indonesia telah mengalami pergeseran dari sikap pasif menjadi lebih aktif dan kritis. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi penonton terhadap proses hukum, tetapi juga berperan sebagai pengawas sosial yang secara kolektif memberikan tekanan moral terhadap aparat penegak hukum. Budaya hukum yang terbentuk melalui kesadaran hukum kolektif ini menjadi motor penggerak bagi munculnya gerakan masyarakat sipil yang menuntut keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural.

Reaksi masyarakat terhadap kasus Vina menunjukkan bahwa budaya hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan teknologi informasi. Kekuatan media sosial telah membentuk ruang diskusi publik yang luas dan terbuka, di mana masyarakat dapat saling bertukar informasi, mengungkapkan kecurigaan, dan membentuk opini kolektif. Dalam proses ini, budaya hukum masyarakat menjadi sarana artikulasi kritik dan ekspresi ketidakpuasan terhadap proses hukum yang dianggap tidak transparan atau tidak memenuhi rasa keadilan. Dalam hal ini, budaya hukum masyarakat juga menjadi bentuk kontrol sosial informal terhadap aparat hukum yang memiliki kewenangan formal.

Maka budaya hukum masyarakat juga memiliki potensi dilematis. Di satu sisi, reaksi masyarakat yang kuat dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas aparat hukum. Akan tetapi, di sisi lain, tekanan publik yang berlebihan tanpa dasar hukum yang kuat dapat menimbulkan *trial by the public* atau pengadilan oleh opini publik. Hal ini dapat menciptakan tekanan yang tidak sehat terhadap proses hukum, merusak asas praduga tak bersalah, dan mempersulit proses investigasi yang objektif. Oleh karena itu, budaya hukum yang ideal adalah budaya hukum yang tidak hanya aktif, tetapi juga rasional, kritis, dan berbasis pada pemahaman hukum yang memadai.

---

Dalam kasus Vina salah satu aspek penting dari budaya hukum masyarakat adalah munculnya solidaritas publik terhadap korban dan keluarganya. Masyarakat luas merasa bahwa ada ketidakadilan yang belum terselesaikan, dan karena itu muncul berbagai inisiatif untuk mendukung upaya pengungkapan kebenaran. Solidaritas ini menunjukkan bahwa budaya hukum tidak sekadar berkaitan dengan aturan hukum tertulis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketika hukum formal dianggap gagal memenuhi rasa keadilan, masyarakat mengaktualisasikan budaya hukumnya melalui tindakan sosial yang mendorong reformasi dan akuntabilitas (Lestiani, L., & Yusuf, H. 2025).

Maka budaya hukum masyarakat juga tercermin dari ekspektasi publik terhadap institusi hukum. Masyarakat berharap aparat penegak hukum bekerja secara profesional, transparan, dan tidak tunduk pada intervensi politik atau kekuasaan. Ketika ekspektasi ini tidak terpenuhi, timbul krisis kepercayaan yang mengganggu legitimasi sistem hukum. Oleh karena itu, budaya hukum masyarakat berperan sebagai indikator sejauh mana sistem hukum bekerja secara efektif dan dipercaya oleh warga negara. Dalam hal ini, kasus Vina menjadi cerminan penting bagi negara untuk melakukan introspeksi terhadap integritas institusi penegak hukum.

Maka peran budaya hukum masyarakat dalam kasus Vina juga menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya produk dari sistem hukum formal, tetapi juga hasil dari interaksi sosial antara masyarakat dan aparat hukum. Ketika budaya hukum masyarakat kuat dan didukung oleh kesadaran hukum yang tinggi, maka akan tercipta tekanan positif bagi aparat hukum untuk bekerja secara profesional. Sebaliknya, jika budaya hukum lemah, masyarakat akan mudah terjebak pada sikap apatis atau permisif terhadap penyimpangan hukum.

Dengan demikian budaya hukum masyarakat memainkan peran strategis dalam mendorong keberhasilan atau kegagalan proses penegakan hukum. Dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon, budaya hukum masyarakat telah menjadi kekuatan sosial yang menghidupkan kembali perdebatan publik, membongkar kegagalan, dan mendorong evaluasi terhadap kinerja lembaga hukum. Peran ini harus dijaga dan diarahkan agar tetap dalam koridor hukum dan keadilan, sehingga budaya hukum yang terbentuk benar-benar menjadi landasan bagi pembaruan sistem hukum nasional.

Secara keseluruhan budaya hukum masyarakat dalam kasus Vina menunjukkan wajah baru dari partisipasi hukum di Indonesia. Masyarakat tidak hanya menjadi objek dari sistem hukum, tetapi juga subjek yang aktif membentuk dan mengawasi jalannya keadilan. Perubahan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat hubungan antara hukum dan masyarakat, agar sistem hukum Indonesia tidak hanya berjalan berdasarkan hukum tertulis, tetapi juga sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

## Unsur Penyebab Mengapa Kasus Pembunuhan Vina Cirebon Terlalu Lama Penyelesaiannya

Lambatnya penyelesaian kasus pembunuhan Vina di Cirebon menjadi perhatian publik yang sangat luas, bukan hanya karena sifat kejahatannya yang tragis, tetapi juga karena proses penegakan hukum yang memunculkan banyak pertanyaan dan polemik. Kasus ini bermula sejak tahun 2016, namun hingga bertahun-tahun kemudian masih menyisakan banyak ketidakjelasan, termasuk mengenai siapa pelaku sesungguhnya, bagaimana kronologi kejadiannya, dan mengapa proses hukum berjalan lambat. Berbagai elemen dan faktor berkontribusi terhadap keterlambatan penyelesaian kasus ini, baik yang bersifat struktural, kultural, maupun prosedural. Seluruh faktor tersebut saling terkait dan saling memperkuat, sehingga menciptakan kompleksitas dalam proses hukum yang menyulitkan penyelesaian secara cepat, transparan, dan tuntas.

Salah satu unsur utama yang menyebabkan lambatnya penyelesaian kasus ini adalah lemahnya profesionalisme dan koordinasi aparat penegak hukum dalam menangani perkara sejak awal. Pada tahap awal penyidikan, ditemukan sejumlah kejanggalan dalam pengumpulan alat bukti, proses identifikasi pelaku, hingga pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Penyidikan yang tidak cermat dapat menyebabkan adanya celah dalam proses hukum, seperti tidak terungkapnya fakta penting, terlewatkannya bukti krusial, atau bahkan adanya kemungkinan salah tangkap. Dalam kasus ini, publik mempertanyakan mengapa ada pelaku yang sempat dinyatakan buron selama delapan tahun, dan mengapa kehadiran tersangka baru justru ditemukan setelah tekanan publik menguat. Ketidakkonsistenan aparat dalam menangani perkara ini menunjukkan bahwa sejak awal, manajemen perkara belum dilakukan secara optimal, dan hal ini tentu memperlambat penyelesaian kasus (Cahya, A., Chairunisa, H., Andika, A. D., Sitepu, E. L. B., Annisa, N., Manik, R. P. B., & Wahyuni, T. 2024).

Selain itu lambat nya penyelesaian kasus juga disebabkan oleh budaya birokrasi dalam lembaga penegak hukum yang cenderung kaku, tidak transparan, dan tertutup terhadap kritik. Dalam banyak kasus, termasuk kasus Vina, lembaga penegak hukum sering kali mengedepankan pendekatan administratif dan prosedural yang formalistik, tanpa membuka ruang bagi evaluasi substantif atas proses yang telah dijalankan. Ketika muncul kritik dari masyarakat atau media, respons aparat cenderung defensif dan tidak komunikatif, sehingga memperbesar ketidakpercayaan publik. Padahal, keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik menjadi bagian penting dari akuntabilitas publik. Ketertutupan ini justru memicu spekulasi dan persepsi negatif, yang pada akhirnya memperkeruh situasi dan menunda penyelesaian kasus karena muncul tekanan sosial yang semakin besar namun tidak disikapi secara konstruktif.

Faktor lainnya yang turut memperlambat penyelesaian kasus adalah kurangnya perhatian awal dari institusi penegak hukum terhadap dimensi keadilan substantif. Pada saat perkara pertama kali ditangani, fokus utama tampaknya lebih diarahkan pada penutupan kasus melalui penangkapan pelaku, bukan pada pembuktian secara menyeluruh berdasarkan fakta yang komprehensif.

Hal ini mengakibatkan pengumpulan bukti dilakukan secara terbatas dan tidak memperhitungkan kemungkinan adanya pelaku lain atau skenario alternatif. Ketika di kemudian hari muncul informasi baru dari masyarakat, media, atau saksi lain, proses hukum menjadi tersendat karena aparat harus mengulang atau merevisi hasil-hasil awal yang sudah terlanjur diresmikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan sejak awal lebih bersifat reaktif ketimbang preventif dan menyeluruh, sehingga tidak cukup kuat untuk menyelesaikan perkara secara tuntas (Fitri, S. D. 2025).

Selain dari sisi institusional, penyebab lainnya juga berasal dari faktor budaya hukum masyarakat yang masih lemah. Dalam banyak kasus pidana, termasuk kasus Vina, masyarakat sering kali tidak memahami hak dan kewajiban hukumnya secara utuh, sehingga kurang aktif dalam berpartisipasi membantu proses hukum. Banyak saksi yang enggan memberikan keterangan, takut ditekan, atau merasa tidak aman untuk bersuara. Ketidaksiapan masyarakat untuk menjadi bagian dari sistem hukum menyebabkan proses pencarian bukti dan kesaksian menjadi tersendat. Di sisi lain, masyarakat juga sering kali bersikap pasif ketika proses hukum tampak tidak adil, sehingga tekanan sosial terhadap aparat baru muncul setelah kasus ini diangkat kembali melalui media dan film dokumenter bertahun-tahun kemudian. Keterlambatan reaksi sosial ini berdampak pada keterlambatan penyelesaian hukum itu sendiri.

Faktor politik dan sosial juga tidak bisa diabaikan dalam menjelaskan lambatnya penyelesaian kasus ini. Dalam sistem hukum yang belum sepenuhnya independen, ada kemungkinan intervensi kekuasaan atau tekanan dari pihak-pihak tertentu yang dapat mempengaruhi arah dan kecepatan penyidikan. Meskipun hal ini sulit dibuktikan secara langsung, namun masyarakat sering kali merasa ada "tangan tak terlihat" yang berperan dalam memperlambat proses pengungkapan kasus-kasus besar, terutama jika kasus tersebut menyangkut aktor-aktor yang memiliki pengaruh. Ketika muncul kecurigaan seperti ini, kepercayaan publik terhadap integritas sistem hukum menurun drastis, dan pada akhirnya penyelesaian kasus menjadi semakin sulit karena tercemar oleh kepentingan non-hukum yang menghambat proses objektif.

Media sosial dan pemberitaan yang tidak terkendali juga bisa menjadi penyebab tidak langsung atas lambatnya penyelesaian kasus. Ketika informasi berseliweran tanpa verifikasi yang jelas, aparat menjadi tertekan oleh opini publik dan kadang mengambil langkah yang tidak sesuai prosedur hanya untuk meredam kemarahan massa. Di sisi lain, aparat menjadi terlalu berhati-hati dalam bertindak karena takut membuat kesalahan yang bisa viral dan menuai kecaman. Ketegangan ini menciptakan kondisi kerja yang tidak kondusif bagi penyidikan yang tenang dan mendalam. Dengan demikian, ekspektasi publik yang tinggi namun disertai tekanan yang berlebihan dapat memperlambat langkah penegak hukum untuk fokus bekerja secara profesional dan objektif.

Dari berbagai uraian di atas, jelas bahwa lambatnya penyelesaian kasus pembunuhan Vina di Cirebon bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan akibat dari akumulasi berbagai kelemahan sistemik, baik dari dalam

institusi penegak hukum, budaya hukum masyarakat, hingga tekanan sosial-politik. Untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, perbaikan menyeluruh terhadap sistem penyidikan, transparansi kelembagaan, pendidikan hukum masyarakat, dan independensi peradilan mutlak diperlukan. Kasus Vina menjadi cermin penting bahwa hukum tidak hanya soal aturan, tetapi juga soal kepercayaan, keadilan, dan keberanian untuk menghadapi kebenaran secara utuh dan terbuka.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari analisis kasus pembunuhan Vina di Cirebon menunjukkan bahwa peran budaya hukum masyarakat sangat menentukan dalam memengaruhi jalannya proses penegakan hukum dan legitimasi sistem peradilan. Perubahan dari budaya hukum yang pasif menuju budaya yang lebih kritis dan partisipatif telah mendorong munculnya solidaritas publik serta tekanan moral terhadap aparat penegak hukum untuk bertindak lebih transparan dan akuntabel. Namun, dinamika ini juga menimbulkan dilema ketika opini publik yang belum berbasis fakta kuat menimbulkan tekanan berlebihan yang dapat mengancam prinsip praduga tak bersalah. Lambatnya penyelesaian kasus ini mencerminkan akumulasi kelemahan struktural dan kultural dalam institusi penegak hukum, termasuk minimnya koordinasi dan profesionalisme di awal penyidikan, birokrasi yang tertutup terhadap kritik, dan orientasi yang lebih condong pada penutupan kasus ketimbang pembuktian fakta secara menyeluruh. Di samping itu, rendahnya literasi hukum masyarakat, lemahnya partisipasi saksi, serta adanya intervensi politik dan tekanan media sosial turut memperumit upaya penegakan hukum secara objektif. Kombinasi faktor-faktor ini menegaskan bahwa tanpa budaya hukum yang kuat, baik di tingkat masyarakat maupun institusi, legitimasi sistem peradilan akan terus melemah dan keadilan substantif sulit untuk diwujudkan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Faisyal, F., & Sukmaranti, G. (2024). Kasus Vina Cirebon, Media Sosial Sebagai Sarana Mencari Keadilan. *Oratio Directa (Prodi Ilmu Komunikasi)*, Vol.6 No.1, Hal 19-21.,” n.d.
- Glendikho, A. (2024). Analisis Kasus Vina Cirebon: Solusi Merekonstruksi Kembali Hukum Yang Berkeadilan Dan Responsif. *Desiderata Law Review*, Vol.1 No.2, Hal 83-,” n.d.
- Lestiani, L., & Yusuf, H. (2025). Analisis Kriminologi Terhadap Kasus Pembunuhan Vina Dan Eky Di Cirebon. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol.2 No.5, Hal 76-84.
- Nur, D. E. N., Trisianto, F., & Nugraha, T. F. M. (2024). Peran psikologi sosial dalam bidang hukum pada kasus pembunuhan vina cirebon. *Journal of law and nation*, Vol.3 No.3, Hal 504-509.
- Putri, I. K., Oktaria, J., Ardinata, O., Yanuar, A., & Althafi, F. D. (2024). Viralitas Dan Hukum: Dampak Media Sosial Terhadap Penegakan Hukum Dalam

Kasus Pembunuhan Vina Dan Eky Di Cirebon. Jurnal Terekam Jejak, Vol.2 No.1, Hal 1-19.

Cahaya, A., Chairunisa, H., Andika, A. D., Sitepu, E. L. B., Annisa, N., Manik, R. P. B., & Wahyuni, T. (2024). Analisis Mendalam Tentang Kasus Pembunuhan Vina: Tinjauan Terhadap Proses Hukum, Respons Masyarakat, Dan Implikasi Terhadap Penegakan Keadilan Di Indonesia. Jurnal Lingkar Pembelajaran Inovatif, Vol.5 No.7, Hal 4.

Fitri, S. D. (2025). Perbandingan Metode Naïve Bayes dan Support Vector Machine Pada Kasus Pembunuhan Vina Cirebon Berdasarkan Data X. JUSTINDO (Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi Indonesia), Vol.10 No.1, Hal 39-49.